

PIMPINAN DPRD KOTA MEDAN PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN

NOMOR: \(\omega \).3.2 / \(\omega \).3.7 / Kep-DPRD/01/2025

TENTANG

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2025

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN,

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan, perlu menetapkan Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2024;
 - bahwa hasil penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Medan antara DPRD Kota Medan dan Pemerintah Kota Medan ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD Medan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Medan Tahun 2025;

Mengingat

 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakvat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516):
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 5. Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057),sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 157);
- 8. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2016 Nomor 15), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2022 Nomor 8);
- 9. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Medan (Lembaran Daerah kota Medan Tahun 2017 Nomor 8);
- 10. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2018 Nomor 74), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2023 Nomor 84);
- Memperhatikan : 1. Hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD Kota Medan tanggal 30 Desember 2024;
 - 2. Rapat Paripurna tentang Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Medan (Propemperda) Tahun 2025, tanggal 20 Januari 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA

MEDAN TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN

DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2025.

KESATU

: Menetapkan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Medan Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan

Pada tanggal 20 Januari 2025

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA MEDAN

Ketua

WONG CHUN SEN

Wakil Ketua,

RAJUDIN SAGALA

Wakil Katua,

ZULKARNAEN

Wakil Ketua,

HADI SUHENDRA

Tembusan:

- 1. Wali Kota Medan
- 2. Ketua-Ketua Fraksi DPRD Kota Medan

LAMPIRAN KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN

NOMOR

: 100.3.2 / 1039

TANGGAL : 10 JANUARI 2025

TENTANG : PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2025

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2025

| | JENIS | TENTANG | MATERI POKOK | STATUS | | | | DISERTAI | UNIT / | TADGET | MEMBED V |
|----|---------------------|--|--|--------|----------|--|----------|---------------------------|--|-------------------------|--|
| NO | | | | UBAH | BARU | PELAKSANAAN | NA | PENJELASAN/ KETERANGAN | INSTANSI TERKAIT | TARGET PENYAMPAIAN | KETERA NGAN |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Peraturan Daerah | Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 | Realisasi APBD Kota Medan TA. 2024 dan LKPJ Kota Medan Tahun 2024 | - | V | Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah | - | V | Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan | Masa Persidangan III | Kumulatif Terbuka |
| 2 | Peraturan Daerah | Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2025 | Perubahan Alokasi Program dan Penganggaran Kegiatan Tahun 2025 | - | V | Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah | - | √ | Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan | Masa Persidangan III | Kumulatif Terbuka |
| 3 | Peraturan Daerah | Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan Tahun 2026 | Alokasi Program dan Penganggaran Kegiatan Tahun 2026 | - | V | Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah | - | V | Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan | Masa Persidangan III | Kumulatif Terbuka |
| 4 | | Pencegahan dan Pemadam Kebakaran | Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran Menjadi Tanggung Jawab Bersama Masyarakat dan Pemerintah Dalam Menangani Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran | - | V | Undang-Undang No. 24 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Bencana | V | √ | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan | Masa Persidangan I | Usul Pemko/ Propemperda Tahun 2023 Sudah Harmonisasi |

| | JENIS | TENTANG | MATERI POKOK | STATUS | | | | DISERTAI | UNIT / | TADORT | |
|----|---------------------|---|--|----------|----------|---|----|---------------------------|--|------------------------|----------------|
| NO | | | | UBAH | BARU | PELAKSANAAN | NA | PENJELASAN/ KETERANGAN | INSTANSI TERKAIT | TARGET PENYAMPAIAN | KETERA NGAN |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 5 | Peraturan Daerah | Pencabutan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Medan Tahun 2015- 2035 | Pencabutan Perda dikarenakan Kewenangan Pengaturan tentang RDTR melalui Peraturan Wali Kota Medan | - | √ | Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang | - | - | Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan | Masa Persidangan I | Usul Pemko |
| 6 | Peraturan Daerah | Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok | Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan | ٧ | - | Ketentuan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan | 1 | V | Dinas Kesehatan Kota Medan | Masa Persidangan II | Usul Pemko |
| 7 | Peraturan Daerah | Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah | Perubahan Syarat Untuk Masuk Sekolah Lanjutan | V | | Permen Pendidikan Nasional No17 tahun 2017 tentang Penerimaan Siswa Baru | , | V | Dinas Pendidikan | Masa Persidangan II | Usul Pemko |
| 8 | Peraturan Daerah | Penyertaan Modal Kepada Perusahaan Umum Daerah Pasar Kota Medan | Penanaman Dana dalam bentuk Memperkuat Struktur Permodalan yang dapat dilakukan oleh Swasta, Pemerintah Pusat, Bank, atau Pemerintah Daerah | - | V | Peraturan Otoritas Jasa Keuangan RI No 22 Tahun 2022 tentang Kegiatan Peyertaan Modal | | - | PUD Pasar Kota Medan | Masa Persidangan II | Usul Pemko |
| 9 | Peraturan Daerah | Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2025-2029 | Melaksanakan Ketentuan Pasal 260 ayat(1) dan ayat (2), Pasal 264 ayat (1), dan Pasal 267 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah | - | V | Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah | ٧ | ٧ | Badan Perencanaan Pembangunan Kota Medan | Masa Persidangan II | Usul Pemko |

| | JENIS | | MATERI POKOK | STA | TUS | | | DISERTAI | UNIT / | TARGET PENYAMPAIAN 9 Masa Persidangan III Masa Persidangan IIII Masa Persidangan IIII | |
|----|---------------------|---|---|------|----------|---|----------|---------------------------|----------------------------------|--|----------------|
| NO | | TENTANG | | UBAH | BARU | PELAKSANAAN | NA | PENJELASAN/ KETERANGAN | INSTANSI TERKAIT | TO A CONTRACT OF THE PARTY OF T | KETERA NGAN |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 10 | Peraturan Daerah | Pengarusutamaan Gender | Menciptakan Dasar Pembangunan yang Berkelanjutan dan Inklusif, dengan memasukkan Perspektif Gender | - | V | Permen Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak | V | √ | Dinas P3APMPPKB Kota Medan | | Usul Pemko |
| 11 | Peraturan Daerah | Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan | Pelaksanaan Implementasi Wawasan Kebangsaan dan Nilai Luhur Pancasila, Memperkokoh Persatuan dan Kesatuan Bangsa | - | V | Perpres No 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter dan Permendagri No. 29 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemerintah dala Ranga Revitalsisasi dan Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila | - | - | - | | Usul DPRD |
| 12 | Peraturan Daerah | Sosialisasi Peraturan Daerah yang dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah | Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat, Mengoptimalkan Pelayanan Publik, Memberikan Akses Informasi yang baik dan tepat, Mewujudkan Ketertiban dan Kepastian Hukum | - | 1 | Permendagri No. 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah beserta perubahannya | - | - | - | | Usul DPRD |
| 13 | Peraturan Daerah | Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan | Optimalisasi Penyerapan Aspirasi Masyarakat dalam Pembahasan APBD yang dititipkan kepada DPRD | - | V | Peraturan DPRD Kota Medan No. 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan DPRD Kota Medan No 1 Tahun 2018 tentang Tata tertib | | - | - | A CONTRACTOR OF THE PROPERTY O | Usul DPRD |
| 14 | Peraturan Daerah | Perubahan atas Perda Kota Medan No. 5 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan | Penanggulangan Kemiskinan diperlukan Keterpaduan Terbaru Program yang melibatkan Partisipasi Masyarakat Terkini sehingga perlu diubahnya Perda ini disesuaikan dengan kondisi Kota Medan saat ini | - | V | Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah | - | - | Dinas Sosial Kota Medan | Masa Persidangan III | Usul DPRD |
| 15 | Peraturan Daerah | Perubahan atas Perda Kota Medan No. 4 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Kota Medan | Dalam mencapai Derajat Kesehatan yang setinggi-tingginya bagi Pembangunan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia di Kota Medan | - | √ | Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah | - | - | Dinas Kesehatan Kota Medan | Masa Persidangan III | Usul DPRD |

| | JENIS | TENTANG | MATERI POKOK | STATUS | | | | DISERTAI | UNIT / | MAD CIDM | WEMPD A |
|----|---------------------|--|--|--------|------|---|----|---------------------------|---|-------------------------|----------------|
| NO | | | | UBAH | BARU | PELAKSANAAN | NA | PENJELASAN/ KETERANGAN | INSTANSI TERKAIT | TARGET PENYAMPAIAN | KETERA NGAN |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 16 | Peraturan Daerah | Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi | Pemerataan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi Program Transformasi Digital dengan cakupan Pelayanan Telekomunikasi yang meminimalisir keberadaan kabel udara agar selaras dengan Kaidah Estetika dan Pola Tata Ruang Kota | - | V | Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah | - | - | Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan | Masa Persidangan III | Usul DPRD |

Ditetapkan di Medan Pada Panggal 20 Januari 2025

DPRD KOTAMEDAN

te

WONG CHUN SEN

WAKIL KETUA,

RAJUDIN SAGALA

WAKIL KET IA

ZULKARNAEN

WAKIL KETUA,

HADI SUHENDRA